

INSPEKTORAT ACEH



RENCANA KERJA 2023



PEMERINTAH ACEH INSPEKTORAT

Jalan Gurami No. 17 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telp. (0651) 7551400 - 7551413 Fax. 7551414

E-mail : inspektorat@acehprov.go.id Website : inspektorat.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2023 merupakan Pedoman Umum pelaksanaan tugas yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan baik oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Aceh. Hal ini merupakan pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Aceh Tahun 2023 – 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 dengan mengakomodasikan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Aceh ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Tahun 2023.

Banda Aceh, 2022

INSPEKTUR ACEH

JAMALUDDIN, SE, M.Si, Ak
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19750701 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT T.A 2019	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2019 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Aceh	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT ACEH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Aceh	13
3.3. Program dan Kegiatan	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT ACEH	
4.1. Rumusan Rencana Program dan Prakiraan Tahun 2024	15
BAB V PENUTUP	19
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu Kebijakan Umum Pembangunan Aceh Tahun 2023 - 2026 adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang Bersih (*Clean Government*). Hal itu sejalan dengan keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang dilandasi oleh transparansi pengelolaan anggaran, pemilihan program yang tepat sasaran serta didukung dengan peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Aceh adalah salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah secara transparan dan akuntabel. Inspektorat Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh, mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Aceh serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Tugas dan fungsi Inspektorat Aceh tersebut merupakan ruang lingkup dan tanggung jawab yang diemban oleh Inspektorat Aceh dalam rangka memperlancar kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Aceh. Di lain pihak kelancaran dan keberhasilan pengawasan sangat didukung oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan yang profesional, tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan didukung dengan anggaran yang mencukupi serta program kerja yang efektif dan tepat sasaran.

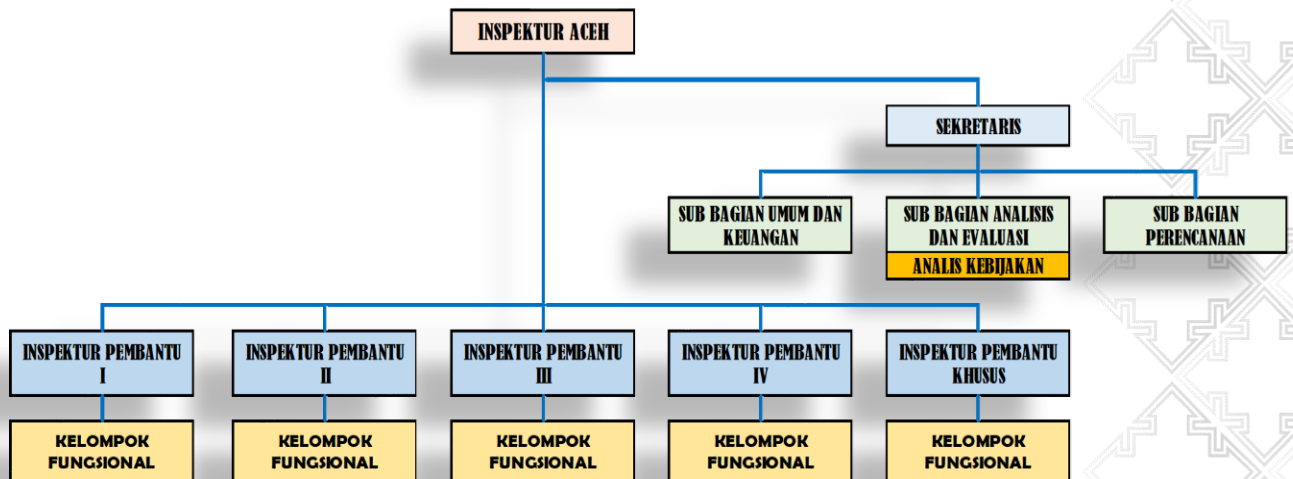
Inspektorat Aceh memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan upaya-upaya pembinaan dalam hal pengawasan, agar prinsip-prinsip tersebut di atas dapat diwujudkan upaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamisasi yang terjadi di dalam Pemerintahan Aceh sekarang ini disamping berpedoman kepada peraturan dan kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam kebijakan teknis pengawasan di daerah, Inspektorat Aceh sebagai salah satu fungsi manajemen memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Aceh dengan fungsi utamanya adalah pembinaan dan pengawasan kinerja Pemerintahan Daerah. Sehingga, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan/program di segala bidang di daerah kiranya menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan Otonomi Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Inspektorat Aceh dipimpin oleh seorang Inspektur dan Sekretaris yang menangani masalah Intern Perangkat Daerah.

Secara teknis Inspektorat Aceh memiliki 5 (lima) bidang pengawasan yang dipimpin oleh masing-masing Inspektur Pembantu dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Aceh. Struktur Organisasi Inspektorat Aceh dapat dilihat pada Bagan berikut:

Struktur Organisasi Inspektorat Aceh



1.2. Landasan Hukum

Inspektorat Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023;
24. Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/21822 tanggal 16 Desember 2021 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPA Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh adalah sebagai landasan kerangka kerja untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh Tahun 2023 adalah sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan Gubernur Aceh. Hal ini merupakan proses pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengakomodasikan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh Tahun 2023 disajikan dalam 5 (Lima) bab. Bab I Pendahuluan berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan; Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2021 dan Rencana Strategis Inspektorat (Tabel T-C.29), Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh (Tabel T-C.30), Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Aceh, dan Review terhadap RKPA 2023; Bab III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Aceh berisikan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Aceh, dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan, Bab IV Reencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Aceh (Tabel T-C. 33) dan Bab V sebagai Penutup.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh Tahun 2021 dan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2007 - 2022

Inspektorat Aceh pada Tahun 2021 memiliki 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan tugas pokok dan fungsi dimana telah bertambah 2 (dua) kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) yang merupakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program tersebut adalah “*Penyelenggaraan Pengawasan, dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi*”, Secara rinci capaian Renja Inspektorat Aceh per kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2021 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 30 laporan telah terealisasi sebanyak 77 laporan atau **256,70%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.696.348.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp722.905.600,00 atau 43%. Rendahnya realisasi dikarenakan terbatasnya Fungsional Pengawasan yang melakukan pemeriksaan yang berakibat pengurangan hari dan personil yang terlibat dalam pengawasan, juga dikarenakan penyusunan Program Pengawasan terhadap Pemeriksaan Kinerja yang berpedoman pada Program Prioritas Pembangunan di Tahun bersangkutan tidak berjalan maksimal karena Pemilihan Program Prioritas Aceh hanya dilakukan pada

1 (satu) program prioritas, serta perbedaan nilai komponen satuan anggaran yang lebih besar dari kondisi lapangan.

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2021 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 23 laporan telah terealisasi sebanyak 95 laporan atau **413,00%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.292.102.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.736.904.200,00 atau 87,00%. Rendahnya realisasi dikarenakan terbatasnya Fungsional Pengawasan yang melakukan pemeriksaan yang berakibat pengurangan hari dan personil yang terlibat dalam pengawasan, juga disebabkan nilai komponen anggaran penginapan yang lebih besar dari kondisi lapangan.

c. Reviu Laporan Kinerja

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2021 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 54 laporan telah terealisasi sebanyak 51 laporan atau **94,40%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp655.130.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp112.155.000,00 atau 17,00%. Rendahnya realisasi dikarenakan terbatasnya Fungsional Pengawasan yang melakukan Reviu yang berakibat pengurangan hari dan personil yang terlibat dalam pengawasan yang berakibat pada pembayaran penugasan tidak dapat dilakukan.

d. Reviu Laporan Keuangan

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2021 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 16 laporan telah terealisasi sebanyak 53 laporan atau **331,30%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp760.950.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp285.740.000,00 atau 37,55%. Rendahnya realisasi dikarenakan terbatasnya

Fungsional Pengawasan yang melakukan Reviu yang berakibat pengurangan hari dan personil yang terlibat dalam pengawasan yang berakibat pada pembayaran penugasan tidak dapat dilakukan.

e. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2021 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 149 laporan telah terealisasi sebanyak 78 laporan atau **52,30%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.935.920.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp951.055.534,00 atau 49%. Rendahnya realisasi dikarenakan terbatasnya Fungsional Pengawasan yang melakukan pemeriksaan yang berakibat pengurangan hari dan personil yang terlibat dalam pengawasan, juga disebabkan nilai komponen anggaran penginapan yang lebih besar dari kondisi lapangan. Selain itu jumlah pengaduan yang masuk dan dilaporkan kepada Inspektorat Aceh atau melalui Pimpinan terjadi penurunan.

f. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT Tahun 2021 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 22 laporan telah terealisasi sebanyak 83 laporan atau **377,30%**.

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.236.551.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.370.529.896,00 atau 42%. Rendahnya realisasi dikarenakan terbatasnya Fungsional Pengawasan yang melakukan pemeriksaan yang berakibat pengurangan hari dan personil yang terlibat dalam pengawasan, juga disebabkan nilai komponen anggaran penginapan yang lebih besar dari kondisi lapangan, hal ini juga berakibat pada beberapa penugasan yang tidak dapat terbayarkan dan tahapan penugasan pendampingan (*probit audit*) yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh

Dalam pelaksanaan kinerja Inspektorat Aceh dari Tahun 2017-2022 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti. Semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta adanya penambahan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi permasalahan secara nasional. Dalam penerapan Rencana Strategis Pemerintah Aceh Tahun 2017 – 2022 ke dalam Rencana Kerja Inspektorat, telah terjadi ketidaksesuaian Program dan Kegiatan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena Program dan Kegiatan yang tersaji di dalam Renstra telah terjadi perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050. Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Aceh mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian Indikator Capaian, Target dan Sasaran di dalam Renstra.

Secara rinci analisis pelaksanaan Kinerja Pelayanan SKPA disajikan dalam Tabel. T.C 30 sebagai lampiran dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 ini.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Aceh.

Pada aspek kelembagaan Inspektorat Aceh masih terdapat kelemahan di antaranya:

- a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
- b. Inspektorat mempunyai beban tugas yang besar menyangkut pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, efektifitas penggunaan anggaran dan pengawalan terhadap kebijakan Pimpinan Daerah serta pelimpahan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Hal tersebut membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM di bidang pengawasan.
2. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang cepat.
3. Nilai komponen perjalanan dinas yang belum sesuai kondisi.

4. Kondisi secara Nasional yang belum kondusif terkait menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19).
5. Masih terdapat aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat lainnya yang belum memahami arti pentingnya pengawasan.
6. Rendahnya kesadaran pejabat SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (baik hasil pengawasan Internal maupun Eksternal) khususnya terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah lama.

2.4. Reviu terhadap RKPA.

Terhadap rancangan awal yang telah ditetapkan dalam RKPA untuk Inspektorat Aceh Tahun 2023 dari segi program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran dalam masa perjalanan penggunaan anggaran mengalami perubahan. Lebih jelasnya disajikan pada tabel T-C.31.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Aceh

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu program dalam Kebijakan Nasional Pemerintah adalah menciptakan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*) maka Inspektorat Aceh menegaskan tidak menghendaki terjadinya segala bentuk *Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan* dan *Penyalahgunaan Keuangan Daerah*, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat mengakibatkan kebobrokan ekonomi rakyat dan menggerogoti keuangan daerah sehingga pada akhirnya akan mengganggu proses damai yang telah dibangun dengan susah payah.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi dan menurunkan kasus korupsi. Dalam kaitan itu, upaya pemberantasan korupsi hendaknya terus ditingkatkan, karena apabila dana-dana tersebut tidak dikorupsi maka akan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sejak sekarang dan seterusnya, Inspektorat Aceh menghendaki pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta menganut prinsip 3 E yaitu efisien, efektif dan ekonomis agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah yang dapat merugikan daerah.

Bahwa korupsi telah menimbulkan krisis kepercayaan, Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan kepada pemerintah menjadi terkikis. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan pernah berhasil. Karena itu seluruh masyarakat dari berbagai pihak terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi di Aceh.

Pemeriksaan tidak akan bermanfaat apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai, dan hanya akan merupakan pemborosan terhadap dana yang digunakan bagi pemeriksaan itu sendiri. Menyadari

bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru di Aceh dan menunggu langkah-langkah nyata yang diambil dalam rangka menurunkan kasus korupsi secara signifikan. Untuk itu dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN kedepan diharapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan proses perencanaan program dan penganggaran secara terpadu dan berkesinambungan.
- b. Menekankan agar pengelolaan APBA sejak penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga APBA dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- c. Mengarahkan Pemerintah Aceh untuk menerapkan penganggaran yang taat azas dan berorientasi pada prestasi kerja atau melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Melimpahkan tanggungjawab proses penyelesaian administrasi dan penatausahaan serta akuntansi keuangan daerah kepada setiap satuan kerja perangkat aceh.
- e. Mewajibkan instansi pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBA sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- f. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Aceh.
- g. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- h. Bersama-sama dengan DPRA melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara/daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBA.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Aceh.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Aceh. Hal ini merupakan pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2023 dengan mengakomodasikan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan sasaran utama dari rencana kerja adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Aceh guna mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*).

3.3. Program dan Kegiatan.

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya pengawasan secara berkelanjutan, Inspektorat Aceh telah menyusun berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Aceh 2023-2026 serta kebijakan strategis lainnya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Aceh untuk Tahun 2023 mempunyai 3 (tiga) Program rutin yang terdiri dari

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Aceh terdapat pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 (dua) kegiatan didalamnya yaitu (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan (2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (2) Pendampingan dan Asistensi.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Aceh

4.1. Rumusan Rencana Program dan Prakiraan Tahun 2024

Sebagai perpanjangan tugas dari Pemerintah dibidang Pengawasan, Inspektorat Aceh berusaha melaksanakan segala tugas yang diemban dengan sebaik mungkin, melalui pengawasan dan pembinaan yang telah terprogram sehingga dapat terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dan akan menciptakan Pemerintah Aceh yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyalahgunaan keuangan dan kekuasaan, diharapkan masa depan Aceh akan tumbuh menjadi negeri yang makmur yang berkeadilan, sehingga terciptanya Pemerintahan yang “*Good Governance* dan *Clean Government*”.

Perencanaan Kinerja pengawasan Inspektorat Aceh dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 (dua) kegiatan didalamnya yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan 9 (sembilan) sub kegiatan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan serta kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 5 (lima) sub kegiatan di dalamnya.

Rencana Program Inspektorat Aceh tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	113 Orang
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	113 Orang
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
1.5.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit
1.5.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit
1.8.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	139 Unit
1.8.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	185 M2
1.8.5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Bulan

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	97 Laporan
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan
2.1.5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1 Laporan
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	70 Dokumen
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan
2.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Laporan
3.2	Pendampingan dan Asistensi		
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 Laporan
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14 Laporan
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Laporan
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Kegiatan

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) adalah “Mewujudkan Birokrasi yang bersih, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas dalam Mengawal Kebijakan Kepala Daerah” dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “**Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**”.

Rincian Program dan Kegiatan serta pendanaan terkait program yang direncanakan Inspektorat Aceh untuk Tahun 2022 beserta target penganggaran yang telah disusun untuk Tahun 2023 tersebut disajikan dalam Tabel.T-C. 33 (terlampir).

BAB**V****Penutup**

Rencana Kerja sebagai rencana pembangunan jangka pendek Satuan Kerja Pemerintah Aceh adalah dokumen perencanaan untuk Periode 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Aceh. Untuk dapat terlaksananya Renja – SKPA tersebut maka sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan serta pengawasan yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Pemerintahan Aceh. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Aceh Tahun 2023 disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Aceh Tahun 2023.

Banda Aceh, 2022

INPEKTUR ACEH

JAMALLUDDIN, SE, M.Si, Ak

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.19750701 199303 1 002

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Aceh dan Pencapaian Renstra Inspektorat Aceh s/d Tahun 2021

INSPEKTORAT ACEH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat Aceh) (Tahun 2017-2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan					
												Target Renja SKPD Tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5		6		7		8	9 = (8/7)	10		11 = (6+8)		12 = (11/5)	
6	01	02			Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH	Program Penyelenggaraan Pengawasan															
6	01	02	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan/pe meriksaan yang	680	LHP	498	LHP	201	LHP	312	LHP	155,22	150	LHP	810	LHP	119,12
6	01	02	1.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						30		77		256,67					
6	01	02	1.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						23		95		413,04					
6	01	02	1.01	03		Reviu Laporan Kinerja						54		51		94,44					
6	01	02	1.01	04		Reviu Laporan K\euangan						16		53		331,25					
6	01	02	1.01	05	Inventarisasi temuan Pengawasan		Jumlah Rakor Pemutakhiran Data Tindak					5		1		20,00					
6	01	02	1.01	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah temuan hasil pengawasan						68		30		44,12				
6	01	02	1.01	07		Monitoring dan Evaluasi Indak						5		5		100,00					
6	01	02	1.02		Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti	158	LHP	137	LHP	149	LHP	34	LHP	22,82	30	LHP	171	LHP	108,23
6	01	02	1.02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						149		78		52,35					

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat Aceh) (Tahun 2017-2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan					
													Target Renja SKPD Tahun (2021)		Realisasi Renja SKPD Tahun (2021)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1						2	3	4	5		6		7		8	9 = (8/7)	10		11 = (6+8)		12 = (11/5)	
6	01	03					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi															
6	01	03	1.01			Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	1	Laporan	3	Laporan	60,00
6	01	03	1.01	01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (PKPT)						1	Laporan	1		100,00					
6	01	03	1.02			Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Aceh	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan pada daerah yang memiliki resiko terjadinya pungutan liar	46	Laporan	3	Laporan	23	Laporan	48	Laporan	208,70	1	Laporan	51	Laporan	110,87
6	01	03	1.02	01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						16		41		256,25					
6	01	03	1.02	02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi						1		1		100,00					
6	01	03	1.02	03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						5		5		100,00					
6	01	03	1.02	04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (SABERPUNGLI)						1		1		100,00					

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
INSPEKTORAT ACEH

[illegible]

TABEL C.31
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA
INSPEKTORAT ACEH

No.	RANCANGAN AWAL RKPA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INSPEKTORAT DAERAH				56.692.752.152		INSPEKTORAT DAERAH				48.596.085.000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				40.802.784.052		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				36.382.288.558		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				177.305.000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				170.984.593		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Tersedianya Dokumen RKPA, Renstra dan Renja Inspektorat Aceh	4 Laporan	47.640.000	PAA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	18.512.926	PAA	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program beserta Penganggarannya	5 Laporan	123.590.000	PAA	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	145.467.750	PAA	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program beserta Penganggarannya	3 Laporan	6.075.000	PAA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.003.917	PAA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.356.275.816		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.209.080.613		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang	25.889.137.816	DAU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang	25.655.559.193	DAU	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1.353.918.000	PAA	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.438.190.000	PAA	
05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	113.220.000	PAA	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	115.331.420	PAA	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.809.867.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.837.074.000		
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Tersedianya Prasarana ASN yang memadai	113 Orang	254.400.000	PAA	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	113 Orang	1.600.000	PAA	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Meningkatnya Pemahaman pegawai sesuai dengan Tugas dan Fungsi	236 Orang	1.769.687.000	PAA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	1.114.371.000	PAA	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Meningkatnya Kemampuan ASN di Bidang Pengawasan dan Perundang-Undangan	51 Orang	785.780.000	PAA	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	113 Orang	721.103.000	PAA	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.934.778.555		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.808.358.237		
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50 Jenis	731.712.594	PAA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	558.955.576	PAA	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	148.973.961	PAA	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	152.370.661	PAA	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13680 expl	50.940.000	PAA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	65.880.000	PAA	

No.	RANCANGAN AWAL RKPA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Terselenggaranya Rakor dan Konsultasi SKPA	40 Kali	1.003.152.000	PAA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.031.152.000	PAA	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.532.154.353		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.999.496.125	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Tersedianya Sarana dan Prasanara Aparatur	5 Unit	3.433.500.000	PAA	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	686.700.000	PAA	
	Pengadaan Mebel	Banda Aceh	Tersedianya Sarana dan Prasanara Aparatur	17 Unit	69.355.200	PAA	Pengadaan Mebel	Banda Aceh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	69.355.200	PAA	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banda Aceh	Tersedianya Sarana dan Prasanara Aparatur	45 Unit	955.000.000	PAA	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	597.500.000	PAA	
07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Banda Aceh	Tersedianya Sarana dan Prasanara Aparatur	32 Unit	601.947.227	PAA	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	458.830.925	PAA	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Tersedianya Sarana dan Prasanara Aparatur	102 m2	472.351.926	PAA	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	187.110.000	PAA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.956.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.956.000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terlaksananya Pengiriman Surat Menyurat	180 kg	7.020.000	PAA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	7.020.000	PAA	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terbayarnya tagihan Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	396.936.000	PAA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	396.936.000	PAA	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.588.447.328		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.953.338.990	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terpeliharanya serta terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	30 Unit	1.558.402.000	PAA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	1.771.930.000	PAA	
05	Pemeliharaan Mebel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terpeliharanya Mebeleir Kantor	1 Tahun	8.320.000	PAA	Pemeliharaan Mebel	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	24.720.000	PAA	
07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terpeliharanya Aset Pemerintah Aceh	1 Tahun	208.020.000	PAA	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	208.137.750	PAA	
10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	536.970.025	PAA	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	185 M2	397.072.640	PAA	
11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan	1 Tahun	276.735.303	PAA	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	551.478.600	PAA	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					9.711.883.500		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.509.110.203	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal					7.967.585.500		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					6.452.985.453	
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	1.037.121.000	PAA	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan	882.916.236	PAA	
02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	3.290.911.000	PAA	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	1.527.063.350	PAA	

No.	RANCANGAN AWAL RKPA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Reviu Laporan Kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Reviu Kinerja	103 Laporan	282.574.000	PAA	Reviu Laporan Kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	97 Laporan	231.502.895	PAA	
04	Reviu Laporan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Reviu Keuangan	25 Laporan	472.230.000	PAA	Reviu Laporan Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan	488.765.875	PAA	
05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1 Laporan	233.362.000	PAA	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1 Laporan	176.388.070	PAA	
06	Kerjasama Pengawasan Internal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan dengan APIP Lainnya	3 Laporan	264.288.000	PAA	Kerjasama Pengawasan Internal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	432.223.105	PAA	
07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	70%	2.387.099.500	PAA	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	70 Dokumen	2.714.125.922	PAA	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.744.298.000		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.056.124.750	
01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang di sidangkan	4 Laporan	336.068.000	PAA	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	204.273.350	PAA	
02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	40 Laporan	1.408.230.000	PAA	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	851.851.400	PAA	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					6.178.084.600		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.704.686.239	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					762.193.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					761.687.070	
01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Laporan	762.193.000	PAA	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Laporan	761.687.070	PAA	
Pendampingan dan Asistensi					5.415.891.600		Pendampingan dan Asistensi					3.942.999.169	
01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan melalui Probit Audit	45 Laporan	2.300.688.000	PAA	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 Laporan	1.638.298.675	PAA	
02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 Laporan	283.584.000	PAA	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14 Laporan	70.768.494	PAA	
03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tercapainya Pleksanaan Pencegahan Korupsi	6 Laporan	768.590.000	PAA	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Laporan	229.290.000	PAA	
04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Penegakan Integritas	1 Laporan	2.063.029.600	PAA	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Kegiatan	2.004.642.000	PAA	

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
INSPEKTORAT ACEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Pagu 2023 (Rp.)	Prakiraan Pagu 2024 (Rp.)	Keterangan	
												Prioritas Pembangunan	
								Tolok Ukur	Target				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						48.596.085.000	53.058.512.000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						36.382.288.558	37.956.525.052	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.984.593	177.305.000	
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	18.512.926	47.640.000		
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	145.467.750	123.590.000		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.003.917	6.075.000		
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.209.080.613	28.029.036.261	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang	25.655.559.193	26.536.366.261		
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.438.190.000	1.379.450.000		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	115.331.420	113.220.000		
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.837.074.000	2.186.580.000	
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	113 Orang	1.600.000	-		
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	1.114.371.000	1.400.800.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Pagu 2023 (Rp.)	Prakiraan Pagu 2024 (Rp.)	Keterangan
												Prioritas Pembangunan
								Tolok Ukur	Target			
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	113 Orang	721.103.000	785.780.000	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.808.358.237	1.934.693.555	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	558.955.576	731.627.594	
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	152.370.661	148.973.961	
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	65.880.000	50.940.000	
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.031.152.000	1.003.152.000	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.999.496.125	2.403.310.227	
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Banda Aceh	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	686.700.000	1.373.400.000	
				03	Pengadaan Mebel	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Banda Aceh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	69.355.200	0	
				04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Banda Aceh	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	597.500.000	527.500.000	
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Banda Aceh	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	458.830.925	502.410.227	
				08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Banda Aceh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	187.110.000	0	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.956.000	403.956.000	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	7.020.000	7.020.000	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	396.936.000	396.936.000	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.953.338.990	2.821.644.009	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Pagu 2023 (Rp.)	Prakiraan Pagu 2024 (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program				Prioritas Pembangunan
								Tolok Ukur	Target			
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	1.771.930.000	1.558.402.000	
				05	Pemeliharaan Mebel	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	24.720.000	8.320.000	
				07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	208.137.750	216.008.484	
				10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	185 M2	397.072.640	536.970.025	
				11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	551.478.600	501.943.500	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.509.110.203	9.010.663.348	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					6.452.985.453	7.397.695.348	
				01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74 Laporan	882.916.236	1.000.000.000	
				02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	1.527.063.350	2.584.671.000	
				03	Reviu Laporan Kinerja	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	97 Laporan	231.502.895	282.574.000	
				04	Reviu Laporan Keuangan	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan	488.765.875	471.030.000	
				05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Aceh	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1 Laporan	176.388.070	466.724.000	
				06	Kerjasama Pengawasan Internal	Aceh	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	432.223.105	264.288.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Pagu 2023 (Rp.)	Prakiraan Pagu 2024 (Rp.)	Keterangan	
								Tolok Ukur				Target	Prioritas Pembangunan
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	70 Dokumen	2.714.125.922	2.328.408.348		
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.056.124.750	1.612.968.000		
				01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	204.273.350	336.068.000		
				02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	851.851.400	1.276.900.000		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.704.686.239	6.091.323.600		
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					761.687.070	702.932.000		
				01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Laporan	761.687.070	702.932.000		
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi					3.942.999.169	5.388.391.600		
				01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 Laporan	1.638.298.675	2.273.188.000		
				02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14 Laporan	70.768.494	283.584.000		
				03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Laporan	229.290.000	768.590.000		
				04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	IKU/IKD - Tingkat Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Kegiatan	2.004.642.000	2.063.029.600		